

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. PNPM Mandiri perdesaan

PNPM Mandiri perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kerja. Dengan cara memberdayakan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dengan program yang dijalankan di desanya masing-masing.

##### a. Pengertian PNPM Mandiri perdesaan

Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan adalah program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kerja secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (ppk) yang selama ini dinilai berhasil.<sup>1</sup>

Visi dan misi PNPM Mandiri perdesaan adalah tercapainya perluasan kerja dan kemandirian masyarakat perdesaan sedangkan misinya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaanya.

##### b. Tujuan PNPM Mandiri perdesaan

Tujuan diadakanya PNPM Mandiri perdesaan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, dan secara khusus tujuan PNPM Mandiri perdesaan terdiri dari:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas terpcil dan kelompok masyarjat lainnya.
- 2) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin

---

<sup>1</sup> Pedoman Umum PNPM-Mandiri

melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat.

- 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan pengangguran melalui kebijakan program.
- 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan swasta asosiasi, perguruan tinggi, kelembagaan swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kerja.
- 5) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- 6) Meningkatnya modal sosialisasi masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- 7) Meningkatnya motifasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

### **c. Landasan Hukum**

Dasar hukum PNPM Mandiri yang diluncurkan Presiden RI tanggal 30 April 2007 mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait system pemerintahan, perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

<sup>2</sup> Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan, Fokus Media, 2012, hlm. 87.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendahatraam Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.
- 9) Peratutran Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Cara Pengadaan Pijaman atau Hibah Luar Negeri.
- 11) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12) Praturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- 13) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinntah.
- 14) Inspres Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

- 15) Inspres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Bekeadilan.<sup>3</sup>

#### **d. Sasaran PNPM**

Setiap program kegiatan yang dilakukan pasti memiliki sasaran, sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:

- 1) Lokasi sasaran  
Meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- 2) Kelompok sasaran
  - a) Rumah tangga miskin
  - b) Kelembagaan masyarakat di desa
  - c) Kelembagaan pemerinthan lokal

#### **e. Ketentuan Dasar PNPM**

Ketentuan dasar PNPM mandiri perdesaan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM mandiri perdesaan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi:

- 1) Jenis kegiatan  
Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PNPM mandiri perdesaan adalah sebagai berikut:
  - a) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi.
  - b) Kegiatan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan formal)

---

<sup>3</sup> Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan, Fokus Media, 2012, hlm. 81.

- c) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal tidak termasuk penambahan modal.
  - d) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan
- 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan PNPM mandiri dilakukan setelah menyelesaikan tahapan penyusunan perencanaan alokasi dana kegiatan, meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan pengajuan danapengerahn tenaga kerja. Pelaksanaan kegiatan PNPM mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan di fasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang di bantu oleh fasilitator atau konsultan.<sup>4</sup>

## **2. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

### **a. Pengertian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesempatan kerja oleh program pemerintah. SPP merupakan program penambahan modal yang ditunjukkan bagi mereka yang dinilai sudah memiliki usaha yang cukup untuk dapat membiayai kebutuhan dasar mereka.

SPP ini memang di khususkan untuk kaum perempuan yang diamana pada struktur sosial selama ini kerap dimarjinalkan karena kemiskinan ekonomi dalam keluarga sangat peka dirasakan oleh kaum perempuan. Dengan adanya kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan), maka perempuan dapat menggunakan modalnya

---

<sup>4</sup> Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan, Fokus Media, 2012, hlm. 93.

untuk merintis atau membuat usaha, selain itu dimanfaatkan untuk mengembangkan modal usahanya. Secara normatif Dana yang dilokasikan untuk kegiatan (SPP) Simpan Pinjam Perempuan itu hanya untuk usaha produktif bagi perempuan, dengan tujuan para perempuan mampu mandiri.

#### **b. Jenis-jenis SPP**

Secara umum (SPP) Simpan Pinjam Perempuan ini termasuk salah satu bentuk akad meminjamkan uang, akad meminjamkan uang ini ada beberapa jenis yaitu:

- 1) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mesyaratkan apapun, selesai mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut *aqad qard*.
- 2) Pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- 3) Pemberi pinjaman uang dimana tujuannya untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pinjaman uang dengan maksud seperti ini adalah *hilawah*.<sup>5</sup>

#### **c. Tujuan SPP**

Tujuan (SPP) Simpan Pinjam Perempuan secara umum Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses segala usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Disamping itu kegiatan ini juga mempunyai tujuan yang lain yaitu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi

---

<sup>5</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 18.

rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam kaum perempuan.<sup>6</sup>

Tujuan khusus:

- 1) Meningkatkan jaringan pelayanan program kegiatan dana bergulir.
- 2) Mempercepat proses, pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- 3) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- 4) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.<sup>7</sup>

Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan ini mempunyai sasaran yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan social dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat.

#### **d. Ketentuan dasar SPP**

Ketentuan dasar SPP meliputi:

- 1) Kemudahan.
- 2) Terlembagaan.
- 3) Keberdayaan.
- 4) Pengembangan.
- 5) Akuntabilitas.

Partisipasi perempuan dalam usahanya meningkatkan perekonomian keluarga sekarang ini sudah dapat dilakukan secara luas oleh kaum perempuan di desa. Mereka dapat mengakses dana PNPM Mandiri perdesaan yang ada di UPK, sebagai modal kerja usaha. Peranan perempuan semakin aktif dalam semua tahapan

---

<sup>6</sup> Upk-jatibanteng.blogspot.co.id/2012/06/simpan-pinjam-khusus-perempuan-spp.html?m=1 (diakses pada tanggal 20 Februari 20:13 WIB )

<sup>7</sup>Sofyanhalim.blogspot.com/229/03/kegiatan-simpan-pinjam-kelompok.html?m=1 (diakses pada tanggal 26 Februari pukul 15:23 WIB)

program baik pada kegiatan sosialisasi, perencanaan dan pemeliharaan atau pelestarian.<sup>8</sup>

#### e. Simpan pinjam

Simpan pinjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zat barang itu, boleh dipinjam atau dipinjamkan.

Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَٰئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ سَهْوًا ۗ اَنْ  
صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاَبْرِ  
وَالْتَقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q. S. Al-Ma’idah: 2).<sup>9</sup>

Pinjaman atau Qardh adalah akad pemberian pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayaran bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Pedoman Umum PNPM-Mandiri

<sup>9</sup> Al-Qur’an Surat al Maidah ayat 2, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Alwaah, Semarang, 1989, hlm. 156.

<sup>10</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 183.

Menurut Sayid Sabiq pinjaman adalah harta yang diberikan kreditur kepada debitur (orang yang meminjam). Kemudian debitur mengembalikan pinjaman tersebut setelah dirinya mampu untuk mengembalikannya. Dalam kegiatan SPP diterapkan dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, yang biasa dikenal dengan SPP.<sup>11</sup> Kegiatan Simpan Pinjam khusus perempuan ini mempunyai sasaran yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat.

Hukum pinjaman dalam Islam disunnahkan bagi pemberi pinjaman berdasarkan Qur'an surat Al- Hadid:11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ  
كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q. S. Al-Hadid: 11).<sup>12</sup>

Keunggulan kegiatan SPP pinjaman kelompok yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat ini masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhan dasarnya, merencanakan padat tenaga kerja, melaksanakan kegiatan industri kecil/industri rumah tangga sesuai dengan sumber daya alam yang ada, menggunakan teknologi dan target sasaran yang tepat, dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Totok Mardikanto dkk, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik, Avabeta, Bandung 2015, hlm. 15.

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surat al Hadid ayat 11, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Alwaah, Semarang, 1989, hlm. 902.

<sup>13</sup> Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan, Fokusmedia, 2012,hlm. 87.

### 3. Pemberdayaan

Kata pemberdayaan sangat mudah diucapkan oleh setiap orang khususnya para pejabat pemerintah tanpa keharusan pemahaman pengertiannya dan apa implikasinya dalam sikap dan tindakan nyata dalam pembangunan masyarakat.

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.<sup>14</sup>

Word Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) suatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Sejalan dengan itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpingkirkan) untuk mencapai pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan kedepannya.

Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola sumberdaya alam, lingkungan, sosial, ekonomi untuk

---

<sup>14</sup> Mubyanto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm. 263.

memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini yang berkelanjutan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.<sup>15</sup>

**a. Bentuk-bentuk pemberdayaan**

Bentuk-bentuk pemberdayaan antara lain:

Perbaiki ekonomi, terutama kecukupan pangan.

- 1) Perbaiki kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- 2) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
- 3) Terjaminya keamanan.
- 4) Terjaminya hak asasi manusia yang bebas dari ras takut dan kekhawatiran.<sup>16</sup>

Sedangkan secara bertingkat keberdayaan masyarakat menurut Hurairah dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (basic need).
- 2) Tingkat keberdayaan kedua adalah perluasan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- 3) Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.
- 4) Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- 5) Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan. Randi R Wrihatniko dan R. Nugroho Dwodjowinto mengungkapkan bahwa sebuah

---

<sup>15</sup> M. Yunus, "Grammen Bankk" <http://shavaat.wordpress.com/2012/01/Muhammad-Yunus-Grammen-Bank/>. (diakses pada tanggal 26 februari pukul 20:15)

<sup>16</sup> Totok Mardikanto dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*, Avabeta, Bandung 2015, hlm. 28.

proses, pemberdayaan mempunyai 2 tahapan. Tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut yaitu: tahap penyadaran dan tahap pengkapasitasan. Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Disamping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya.

Tahap pengkapasitasan, tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki ketrampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya yang berada diluar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya.<sup>17</sup>

#### **b. Proses pemberdayaan**

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (diperdesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pada pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat yang sebagian besar anggotanya adalah sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian

---

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 160-162.

yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang didalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasioanal. Artinya apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama harus dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safety net) ujang pemikiranya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu.<sup>18</sup>

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.<sup>19</sup>

Dalam rangka pembangunan nasional Indonesia dewasa dikatakan, bahwa tujuan dan arah pembangunan itu terkandung usaha membangun manusia-manusia pembangun, yaitu manusia-manusia Indonesia yang sadar akan perlunya membangun hari esok yang lebih baik dari pada hari ini, yang percaya pada diri sendiri,

---

<sup>18</sup>Totok Mardikanto dkk, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik, Avabeta, Bandung, 2015, hlm. 49-52.

<sup>19</sup>Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, ALFABETA, Bandung, 2014, hlm. 49.

bahwa ia dapat memperbaiki hidupnya dan memiliki kemampuan serta sikap yang diperlukan untuk merubah nasibnya. Disamping itu dikatakan bahwa perluasan tenaga kerja merupakan sasaran penting bagi pembangunan. Untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia diperlukan tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan ketrampilan yang sesuai dengan keperluan pembangunan.

Pembangunan di bidang ekonomi harus juga dibarengi dengan pembangunan dalam ketenagaan perguruan tinggi sebagai salah satu sarana pembinaan tenaga harus bersedia dan mampu menjawab tantangan tersebut. Dalam hubungan ini repelita dikatakan bahwa lembaga-lembaga perguruan tinggi diusahakan agar mampu meningkatkan diri secara kualitatif untuk menghadapi perubahan-perubahan yang senantiasa memerlukan pemecahan guna pembangunan kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Sejak repelita III pelaksanaan pembangunan yang menekankan pemerataan dituangkan dalam delapan jalur pemerataan, adalah:

- 1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
- 2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- 3) Pemerataan pembagian pendapatan.
- 4) Pemerataan kesempatan kerja.
- 5) Pemerataan kesempatan berusaha
- 6) Pemerataan kesempatan dan kaum wanita.
- 7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
- 8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
- 9) Pelaksaaan pembangunan delapan jalur pemerataan pada hakekatnya diarahkan untuk memecahkan tiga masalah utama

---

<sup>20</sup> Siagian, Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-cita Dan Realita, Alumni, Bndung, 1978, hlm. 247.

pembangunan, yakni pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.<sup>21</sup>

Hasanuzzaman memetakan beberapa peran dan fungsi negara dalam konteks pembangunan ekonomi rakyat, yaitu:

- 1) Pembuat kebijakan dan legislasi. Kebijakan dan legislasi ini diharapkan menjadi instrument yang mampu menekan infisiensi dan diskriminasi.
- 2) Pendidikan dan penelitian. Peran ini dijadikan sebagai instrument dalam menformulasikan ilmu dan pengetahuan yang mampu memberikan efek multipliyer bagi pembangunan segala bidang yang dilakukan negara. Program ini bukan hanya meningkatkan pembangunan baik secara kuantitas dan kualitas, tetapi juga memperkokoh perwujudannya.
- 3) Kesejahteraan publik. Dalam kategori ini fungsi negara adalah menjadi katalisator bagi waga negara untuk mencapai kesejahteraanya. Semuanya ditunjukkan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi dimana hubunganya dengan Allah terganggu.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat, negara memikul tanggung jawab yang merupakan beban psikis dan moral dalam mengelola kekayaan alam negara untuk memajukan dan mesejahterakan kehidupan rakyatnya.

Islam menekankan peran negara dalam beberapa hal: pertama, rakyat merupakan tanggung jawab negara dan karena itu negara wajib menggunakan aset atau kekayaan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sumber daya alam, baik dalam bentuk bumi dan segala isinya dan kesuburan permukaan, air dan segala manfaatnya dan pemanfaatanya dikuasai oleh negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat.

---

<sup>21</sup> Gunawan Sumodiningrat, Pengentasan Kemiskinan Melalui Kredit Perdesaan, PT. Bina Rena Pariwara, 1996, hlm. 2.

Kedua, pemerintah yang mewakili negara menyediakan jaminan sosial melalui pengelolaan harta yang diperoleh dalam suatu kondisi yang aman untuk mensejahterakan rakyat. Kekayaan negara yang diperoleh dari hasil yang ilegal, halal dan baik, dikelola, dimanfaatkan dan disimpan dengan baik untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dengan berpijak pada unsur kebijakan dan keadilan sehingga tidak ditemukan warga negara yang terlunta–lunta, tanpa makanan pakaian, dan perumahan yang memadai.

Ketiga, bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan rakyat, pemerintah memerlukan informasi dan data base yang akurat tentang kesenjangan antara kelompok dalam masyarakat antar pusat dan pinggiran. Dengan cara seperti ini negara akan mudah memetakan dan memecahkan problema kesenjangan rakyatnya.

Keempat, dengan azas dan prinsip kekeluargaan dan persudaraan pemerintah memiliki kewajiban untuk melibatkan semua pihak dalam melaksanakan program atau proyek pembangunan baik secara mental maupun secara fisik. Dengan jalan seperti meminjam.

Kelima, pemerintah baik di daerah maupun di pusat membangun kemitraan dengan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, meningkatkan produktifitas dan kemakmuran mereka.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 102-104.

#### 4. Pengangguran

##### a. Pengertian pengangguran

Pengertian ekonomi tentang pengangguran tidak identik dengan tidak (mau) bekerja. Seseorang yang baru dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya.<sup>23</sup>

Pengangguran adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak bekerja baik. Dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin dapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya.

Menurut SAKERNAS (Survey Angkatan Kerja Nasional), pengangguran didefinisikan sebagai mereka yang mencari pekerjaan saat itu tidak bekerja, mereka yang mempersiapkan usaha yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dalam

---

<sup>23</sup> Prathama Raharja, Teori Ekonomi Makro, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 193.

mendapatkan pekerjaan, mereka yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh banyak negara. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikatakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran.

Berdasarkan pengertian pengangguran di atas, maka pengangguran dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan

2. Pengangguran terselubung

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu untuk satu jenis pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi.

3. Setengah menganggur

Setengah menganggur adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu.

Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktifitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya.

Di Negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal dengan istilah pengangguran terselubung, dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh banyak orang.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan

jumlah penganggur yang besar, pendapatan relative dan kurang merata.

Budaya pilih-pilih pekerjaan juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran. Pada dasarnya setiap orang ingin bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan juga ditambah dengan sifat gengsi, maka tidak heran jika kebanyakan yang ditemukan di Indonesia bukan pengangguran terselubung, melainkan pengangguran terbuka. Yang didominasi oleh kaum intelektual (berpendidikan tinggi). Selain budaya memilih-milih pekerjaan, budaya negatif lain yang menjamur di Indonesia adalah budaya malas. Malas mencari pekerjaan sehingga jalan keluar lain yang ditempuh adalah dengan mengoyok untuk mendapatkan pekerjaan.<sup>24</sup>

Tidak mau mengambil resiko juga menjadi sebuah penyebab pengangguran di Indonesia, terbilang sedikit orang yang mau mengambil resiko demi sebuah pekerjaan. Terlalu berfikir kepada keuntungan atau gaji yang akan diraih, tanpa memperoleh kepada pengalaman yang mungkin bisa didapatkan.

Pembahasan pengangguran tidak lepas dari masalah ketenagakerjaan, yang meliputi kesempatan kerja, lapangan kerja dan pendidikan. Jika faktor-faktor tersebut berhubungan secara negatif maka terciptalah pengangguran. Tingkat pendidikan yang rendah akan menghasilkan peluang kerja yang rendah pula. Kesempatan kerja yang rendah bisa jadi diakibatkan oleh ketersediaan lapangan kerja yang jumlahnya sedikit. Sedangkan lapangan kerja yang sedikit biasanya hanya diperuntukkan bagi individu dengan keahlian (skill) yang memadai. Keahlian yang tinggi akan ditemukan pada kualitas individu yang berpendidikan

---

<sup>24</sup>[www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/jaminansosial/pengangguran](http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/jaminansosial/pengangguran) (Di akses 22 Februari pukul 15:13 WIB)

tinggi, yang notabene berjumlah sedikit dari totalitas masyarakat yang ada,

Konsekuensi logisnya adalah jumlah masyarakat berpendidikan rendah dan yang mayoritas tersebut harus rela dipinggirkan. Sehingga, jika terpaksa bekerja maka jenis pekerjaan yang didapatkan pasti termasuk kategori yang berkualitas rendah yang itu tentu saja memberi kontribusi upah yang rendah pula. Hal demikian merupakan konstitusi ekonomi yang sengaja diciptakan. Konstitusi upah yang rendah secara ekonomis akan menjadikan tingkat pendidikan yang rendah dan berputar lagi pada lingkaran yang demikian itu pada akhirnya adalah penciptaan angka pengangguran antar desa.<sup>25</sup>

#### **b. Bentuk-bentuk pengangguran**

Pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penyediaan dalam pasar kerja. Bentuk-bentuk ketidaksesuaian pasar kerja: (1) friksional (2) musiman (3) siklikal (4) struktural (5) teknologi (6) kurangnya permintaan agregat.

##### **1) Pengangguran friksional**

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk:

- a) Tenggang waktu yang diperlukan selama proses/prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor atau kurangnya informasi.
- b) Kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat bukan disekitar tempat tinggal si pencari kerja.

---

<sup>25</sup> Syaiful Arif, Menolak Pembangunanisme, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 301.

c) Pencari pekerja tidak mengetahui dimana adanya lowongan pekerjaan dan demikian pula pengusaha tidak mengetahui dimana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai.

## 2) Pengangguran musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Diluar musim panen dan turun kesawah banyak orang yang tidak mempunyai kegiatan ekonomis, mereka hanya sekedar menunggu musim yang baru. Selama masa menunggu musim yang baru tersebut mereka digolongkan sebagai penganggur musiman.

Kegiatan ekonomi masyarakat sering kali terpengaruh oleh irama musim. Ada musim giat sehingga banyak permintaan tenaga kerja dan ada masa-masa dimana kegiatan mengendur. Pergantian antara giat dan kendur terjadi secara teratur dalam periode satu tahun, selama kegiatan mengendur terjadi pengangguran yang akan terpecahkan secara otomatis bila tiba masa giat kembali. Pada saat menunggu datangnya musim yang lebih giat oleh pencacah dia akan dicatat sebagai penganggur.

## 3) Pengangguran siklikal

Macam pengangguran seperti ini mirip dengan pengangguran musiman. Namun, hal ini terjadi dalam jangka yang lebih panjang. Hal yang memberatkan lagi adalah bahwa belum tentu orang yang menikmati enakya dipekerjaan pada masa ekonomi sibuk belum tertentu akan mendapatkan tempat yang sama enakya pada saat membaik sesudah terjadinya resesi. Pergeseran-pergeseran individual yang terjadi disamping penderitaan selama pengangguran musiman.

## 4) Pengangguran structural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan

dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan ketrampilan baru tersebut.

Salah satu dampak dari kemajuan ekonomi adalah terjadinya perubahan dominasi peranan ekonomi yang dimainkan oleh setiap sector dalam kegiatan produksi maupun dalam pemerian kesempatan kerja.

#### 5) Pengangguran teknologis

Laju pertumbuhan semakin hari semakin cepat, berbagai industri elektronika. Perubahan teknologi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perubahan teknologi produksi membawa dampak kesempatan kerja berbagai arah. Kekuatan substitutive dan kekuatan merombak spesifikasi jabatan yang ditimbulkan membawa dampak negative bagi kesempatan kerja berupa pengangguran.

#### 6) Pengangguran karena kurangnya permintaan aggregate

Permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakanya kegiatan investasi pengeluaran investasi memberikan peluang untuk tumbuhnya kesempatan kerja. Pengangguran terdidik dapat berbahaya karena golongan terdidik merupakan golongan yang sangat vocal, sehingga dapat mempengaruhi yang berpendidikan tinggi. Namun mereka juga lebih gampang diarahkan dan dicarikan penyelesaian, disamping itu golongan senior ini justru diminta untuk mampu menciptakan pekerjaan tersendiri. Profil semacam ini perlu diketahui untuk mengungkap peta permasalahanya ditinjau dari segi.<sup>26</sup>

Terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah pengangguran yaitu Q. S Huud: 6 Yang bunyinya:

---

<sup>26</sup> Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm. 115-121.

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا  
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Artinya: dan tidak ada suatu binatang melata [709] pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. (Q. S Huud : 60)<sup>27</sup>

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata.

Walaupun ayat tersebut Allah telah menjaminyanya, tetapi hal itu bukan berarti ada persyaratan yang harus dipenuhi syarat yang paling penting adalah usaha dalam mencari rizki yang dijanjikan oleh Allah, karena Allah telah membuat sistem yaitu supaya yang bekerja maka dialah yang mendapatkan rizki dan siapa yang berpangku tangan akan kehilangan.

Sesungguhnya manusia mempunyai kewajiban untuk berusaha dan bekerja. Rasulullah bersabda “seseorang tidak makan yang lebih baik dari makanan yang ia hasilkan dari pekerjaan tanganya. Dan sesungguhnya Nabi Daud as makan dari hasil pekerjaan tangannya.”<sup>28</sup>

### c. Penyebab masyarakat menganggur

Tidak ada satu orang pun yang menghendaki kondisi menganggur. Semua jajaran pemerintahan juga tidak mau memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Tidak ada satupun orang yang bercita-cita menjadi pengangguran. Untuk memahami gambaran pengangguran ini terdapat indikator yaitu:

<sup>27</sup> Al-Qur'an Surat al Huud ayat 60, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Alwaah, Semarang, 1989, hlm. 336.

<sup>28</sup> M. Muhibbin, *Ekonomi Syariah untuk Anak Muslim*, Chil Press, Bandung, 2009, hlm. 44.

- 1) Terdapat orang-orang yang tidak memiliki pemahaman baik tentang kebutuhan dasarnya.
- 2) Ada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan memadai untuk melakukan pekerjaan yang produktif.
- 3) Terdapat orang-orang yang tidak memiliki keterampilan sama sekali.
- 4) Adanya kondisi lingkungan yang tidak mendukung yang dihadapi oleh masyarakat atau tenaga kerja.
- 5) Peran pencari kerja atau masyarakat tidak memiliki semangat untuk bekerja.<sup>29</sup>

Telah dijelaskan bahwa jumlah pengangguran dari tahun ke tahun kian meningkat. Untuk itu perlu diupayakan pemecahannya. Tiga upaya mengurangi pengangguran yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, jika kualitas sumber daya manusia meningkat, otomatis akan meningkatkan tingkat produktivitas secara rasional pula. Dengan meningkatnya sumber daya manusia berarti juga mengurangi pengangguran.
- 2) Menciptakan lapangan kerja baru, jumlah pengangguran di Indonesia dewasa ini cukup memprihatinkan, pengangguran dapat diatasi dengan menempatkan penganggur pada lapangan pekerjaan.
- 3) Menumbuhkembangkan usaha wiraswata, dengan tumbuhnya wiraswatawan baru seperti jamur di musim hujan, di era pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, memunculkan pengusaha muda yang berkualitas merupakan pionir untuk menunjang suksesnya pembangunan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Yansep, *Revolusi Dari Desa*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 76.

<sup>30</sup> Sudradjad, *Kiat Mengrentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm 9–10.

Kewajiban setiap individu adalah berusaha dan berkerja, sedangkan negara diwajibkan menjalankan usaha membasmi pengangguran. Tidak boleh ada pengangguran.

Negara komunis Rusia yang anti materialistis mencantumkan dalam undang–undang dasarnya pasal 12 akan semboyan “siapa yang tidak bekerja dia tidak makan”. Islam dalam kitab sucinya Al – Qur’an mendasarkannya pada cita–cita ketuhanan yang lebih luhur dan tinggi.

Dalam Surat Al-Muddatsir, ayat 38 disebutkan:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.(Q.S. Al-Muddatsir : 38)<sup>31</sup>

Dalam ayat itu, bukan hanya kewajiban bekerja yang dicantumkan, tetapi juga jaminan atas segala usah. Oleh sebab itu, janganlah seorang Muslim duduk berpaangku tangan dengan hanya berdoa kepada Allah Swt tanpa dibarengi usaha mencari rizki kerana langit tidak akan pernah menghujankan emas dan perak.<sup>32</sup>

## B. Hasil penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan mengenai penerapan program PNPM dalam upaya mengurangi pengangguran desa adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian **Bram Christanto** yang berjudul “ *pengaruh keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa gundi kecamatan godong kabupaten grobogan*” berdasarkan analisis nilai rata – rata prosentase variable keberhasilan PNPM mandiri perdesaan

<sup>31</sup> Al-Qur’an Surat al Muddatsir ayat 38, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI,Alwaah, Semarang, 1989, hlm. 994.

<sup>32</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 88.

yang diperoleh, termasuk kategori tinggi yaitu 78,64%. Berdasarkan analisis rata – rata prosentase variable tingkat kesejahteraan masyarakat yang diperoleh, termasuk kategori tinggi yaitu 68,3%. Berdasarkan analisis – analisis nilai rata – rata prosentase variabel keberhasilan PNPM mandiri perdesaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena  $r_h < r_t$  atau  $-0,0622 < 0,344$  (5%) atau  $-0,0622 < 0,4442$  (1%). Hal ini memungkinkan adanya variable lain yang lebih dekat dengan keberhasilan PNPM mandiri perdesaan.<sup>33</sup>

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Bram Christanto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran pemberdayaan masyarakat dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian Bram Christanto hanya mencoba meneliti keberhasilan penerapan program pemberdayaan masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat saja, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti peran pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam mengurangi pengangguran.

2. Berdasarkan penelitian **Jima** yang berjudul “ *Analisis program pnpm mandiri perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat* “ Hasil penelitian dengan menggunakan APH untuk mengetahui peran manajemen sumberdaya manusia diketahui bahwa peran manajemen sumberdaya manusia yang paling kuat adalah perencanaan (planning) dengan hasil eigen vector sebesar 0,444 artinya 44%.

Keberhasilan program PNPM mandiri perdesaan di desa krakitan bayat klaten diperkirakan oleh perencanaan (planning), dengan perencanaan yang kuat dan matang serta bersifat rasional, lentur dan kontinyu maka kegiatan tersebut akan terlaksana dengan baik.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Bram Christanto, “*Pengaruh keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat di desa gundi kecamatan godong kabupaten groboga*” jurnal ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 4 No. 3, 2015.

<sup>34</sup>Jima, “*Analisis program pnpm mandiri perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat*” jurnal Ekonomi Sumber Daya Vol, 14, No. 2, Desember 2013.

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Jima dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian Jima mencoba meneliti implementasi program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat serta peran sumber daya manusia (SDM) yang terlibat didalamnya baik itu pelaku ataupun staf yang berkontribusi dalam program pemberdayaan masyarakat mandiri. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak hanya mencoba meneliti peran pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat saja namun juga dalam upaya mengurangi pengangguran.

3. Berdasarkan penelitian **Siaga basu murbeng, Mochamad saleh, dan Riyanto** yang berjudul “*Pelaksanaan progam nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp)*” proses yang dilakukan tahapan – tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi merupakan langkah – langkah pengelolaan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan adalah sebagai program pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin yang diberi wadah dalam program nasional pemberdayaan nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan . Sehingga dalam hal ini masyarakat belajar untuk berorganisasi dan bekerja sama serta lebih berdaya dan berkemandirian sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga PNPM-MP telah dirasakan mampu untuk:
  - a. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat
  - b. Membantu meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa
  - d. Membantu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat desa.

e. Membantu mengembangkan masyarakat desa.<sup>35</sup>

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Siaga basu murbeng, Mochamad saleh, dan Riyanto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian Siaga basu murbeng, Mochamad saleh, dan Riyanto hanya mencoba meneliti pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan mengurangi pengangguran serta berbagai pelaksanaan terkait mekanisme penyaluran dana dan program-program pemberdayaan masyarakat saja, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti peran program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta mengurangi pengangguran, termasuk terkait pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yaitu berupa program SPP (simpan pinjam perempuan).

4. Berdasarkan penelitian **Asrawi madjid, Vecky A. J masinambow dan patcrik C. Wauran** yang berjudul *“Pengaruh program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan terhadap tingkat kemiskinan di kota kotamabagu”* berkesimpulan bahwa :
- terdapat hubungan signifikan antara PNPM Mandiri perkotaan dengan penanggulangan kemiskinan di kotamabagu
  - Secara simultan bahwa terdapat hubungan yang “sangat kuat” antara PNPM Mandiri perkotaan dengan penanggulangan kemiskinan dikotamabagu.
  - Secara parsial, PNPM-MP dalam menanggulangi kemiskinan di Kota kotamabagu sangat di pengaruhi oleh pembangunan infrastruktur dan social, sedangkan ekonomi tidak berpengaruh.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Siaga Basu Murbeng dkk, *“Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpmp)”* jurnal Administrasi Publik, Vol,1, No. 5, Hal1257 – 1265.

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Asrawi madjid, Vecky A. J masinambow dan patcrik C. Waurandengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran program pemberdayaan masyarakat serta pengaruhnya terhadap menanggulangi kemiskinan sehingga dapat menyejahterakan masyarakat. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan Asrawi madjid, Vecky A. J masinambow dan patcrik C. Wauran mencoba meneliti pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan terhadap tingkat kemiskinan di kota yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan sosial, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti peran pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa serta mengurangi pengangguran.

5. Berdasarkan penelitian **Ade hadiono** yang berjudul “ *kolektibilitas pada program PNPM mandiri perdesaan*” yang berkesimpulan sebagai berikut:
  - a. Secara umum pnpm mandiri di Indonesia mempunyai tingkat kolektibilitas kredit kurang baik karena nilai kolektibilitas kredit berada dikisaran 16% - 19,994% ini diatas ret BI (tingkat kesehatan) yang seharusnya berada dikisaran 5 %. Ini menimbulkan keterlambatan perputaran modal kepada masyarakat.
  - b. Masyarakat senantiasa lebih acuh tak acuh terhadap kewajiban yang harus di bayarkan, selain itu adanya anggapan dari sebagian masyarakat khususnya diperdesaan, yang menganggap bahwa dana itu adalah dana hibah yang disalurkan, ini juga yang mengakibatkan keterlambatan pengembalian kredit yang begitu besar. Sehingga sudah seharusnya pemerintah perlu mengantisipasi dampak yang mungkin timbul dari ketidak seimbangan, jumlah dan efektifitas kredit yang disalurkan.

---

<sup>36</sup>Asrawi Madjid dkk, “*Pengaruh program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan terhadap tingkat kemiskinan di kota kotamabagu*” jurnal berkala ilmiah efisiensi, Vol. 15 No. 04, tahun 2015.

- c. Pengelola SDM pnpm mandiri berfokus pada peningkatan kinerja dan efisien sumber daya manusia melalui implementasi sistem manajemen untuk kerja dan sistem imbalan pegawai untuk mencapai visi dan misi pnpm mandiri perdesaan dimana yang akan datang.<sup>37</sup>

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Ade hadiono dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa melalui pinjaman dana yang diberikan kepada masyarakat. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian Ade hadiono mencoba meneliti keberhasilan pelaksanaan program pemerdayaan masyarakat terkait tingkat kolektibilitas (tingkat pengembalian) terhadap dana pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti penerapan program pemberdayaan masyarakat kegiatan simpan pinjam dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta mengurangi pengangguran termasuk didalamnya tingkat kolektibilitas dan pemanfaatan dana SPP terhadap keberlangsungan hidup masyarakat baik itu dalam hal yang produktif ataupun konsumtif.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatn penelitian, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran digunakan untuk memudahkan arah didalm penelitian.

Perumusan masalah perumusan ini didasarkan pada argenya masalah penerapan kegiatan SPP (simpan pinjam perempuan) program PNPM

---

<sup>37</sup> Ade Hadiono, "Kolektibilitas pada program PNPM mandiri perdesaan" jurnal ilmiah negara Vol. 4 No. 3, September 2012

upaya mengurangi pengangguran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat dilihat pada gambar 2.1:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

